

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Operasional, Administrasi dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Padang dapat diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan judul dari Laporan ini yaitu Laporan Tahunan Kegiatan Operasional, Administrasi dan Keuangan Tahun Anggaran 2023, maka laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan operasional baik kegiatan lapangan maupun laboratorium dan kegiatan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian serta kegiatan keuangan yang meliputi pengeluaran/penggunaan anggaran maupun pemasukan (target dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Selain untuk dapat dijadikan gambaran tentang kegiatan yang dilaksanakan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, Laporan Tahunan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban serta bahan evaluasi untuk perbaikan, pengembangan dan pengambilan kebijakan tentang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di masa yang akan datang, khususnya di Stasiun KIPM Padang. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pegawai Stasiun KIPM Padang atas dedikasi, partisipasi, dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan tahunan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kegiatan Operasional, Administrasi dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna penyempurnaannya dimasa mendatang.

Namun demikian, kami berharap laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pihak Stasiun KIPM Padang maupun pihak unit pelaksana teknis dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lainnya, Instansi ataupun pihak terkait lainnya yang membutuhkan informasi mengenai Stasiun KIPM Padang.

Padang, Januari 2023
Plt Kepala,

Ivonila Etris, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	12
II. PROFIL STASIUN KIPM PADANG	13
2.1 Umum.....	13
2.2 Tugas dan Fungsi.....	14
2.3 Struktur Organisasi.....	15
III KEGIATAN OPERASIONAL	16
3.1 Umum.....	16
3.2 Kegiatan Sosialisasi	16
3.3 Kegiatan Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama	17
3.4 Penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan menggunakan Dokumen Terintegrasi (SNI ISO 9001 : 2015, SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dan SNI ISO/IEC 17020 : 2012)	19
3.4.1 Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	19
3.4.2 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017.....	20
3.4.3 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020 : 2012	22
3.5 Kegiatan Operasional Pelayanan dan Laboratorium.....	22
3.6 Kegiatan Sertifikasi Kesehatan Ikan	24
3.6.1 Sertifikasi Ekspor.....	24
3.6.2 Sertifikasi Domestik Keluar	25
3.6.3 Domestik Masuk	26
3.7 Tindakan Karantina Ikan (8P) Dan Kasus Pelanggaran	27
3.7.1 Tindakan Karantina Ikan (8P)	27
3.7.2 Kasus Pelanggaran	30
3.8 Pemantauan Daerah Sebar HPI/HPIK	31
3.9 Pemantauan Jenis Agen Hayati yang Bersifat Invasif (JABI)	32
3.10 Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB).....	36

3.11 Inspeksi dan Verifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Sertifikasi HACCP) di UPI dan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada Suplier	38
3.12 Monitoring Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (INPRES 01 Tahun 2017).....	41
3.13 Pengelolaan Sertifikat Kesehatan Ikan	42
3.14 Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan.....	43
IV. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN.....	46
4.1 Kegiatan Tata Usaha.....	46
4.1.1 Kegiatan Administrasi Tata Kelola Persuratan.....	46
4.2 Kegiatan Kepegawaian.....	47
4.2.1 Keadaan Pegawai	47
4.2.2 Cuti Pegawai	50
4.2.3 Pegawai Penerima Penghargaan(Reward & Punishment). 51	
4.3 Pengelolaan Keuangan dan Anggaran.....	52
4.3.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	54
4.4 Pengelolaan Barang Milik Negara Stasiun KIPM Padang.....	54
V. PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yang disertifikasi CKIB oleh Stasiun KIPM Padang Tahun 2023....	37
Tabel 2. Data Unit Pengolah Ikan (UPI) yang disertifikasi HACCP oleh Stasiun KIPM Padang Tahun 2023.....	39
Tabel 3. Data Unit Suplier yang disertifikasi CPIB Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2023.....	40
Tabel 4. Mutasi Pegawai Stasiun KIPM Padang Tahun 2023.....	47
Tabel 5. Daftar Jumlah Pegawai Stasiun KIPM Padang Tahun 2023.	47
Tabel 6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Lingkup SKIPM Padang sampai Akhir Tahun 2023.....	48
Tabel 7. Data Pegawai Stasiun KIPM Padang yang Memperoleh Kenaikan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023.....	48
Tabel 8. Data Pegawai Stasiun KIPM Padang yang Memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Tahun 2023.....	49
Tabel 9. Data Pegawai Kontrak Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2023	50
Tabel 10. Data Pegawai Stasiun KIPM Padang yang Mengambil Cuti pada Tahun 2023.....	50
Tabel 11. Revisi DIPA SKIPM Padang Tahun 2023.....	52
Tabel 12. Anggaran Setelah Revisi Tahun 2023.....	53
Tabel 13. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	53
Tabel 14. Realisasi dan Penerimaan PNBPN Tahun 2023.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang	15
Gambar 2. Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK SK Kaban 82 thn 2019.....	28
Gambar 3. Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa HPI/HPIK SK Kaban 82 thn 2019.....	29
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Pemetaan JABI di Kota Padang dan Bukittinggi.	35
Gambar 5. Kegiatan Monitoring Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik	41
Gambar 6. Rangkaian Kegiatan BMK BKIPM Tahun 2023.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Lalu Lintas Ekspor SKIPM Padang 2023
- Lampiran 2. Data Lalu Lintas Domestik Keluar SKIPM Padang 2023
- Lampiran 3. Data Lalu Lintas Domestik Masuk SKIPM Padang 2023
- Lampiran 4. Data Jenis Ikan Hias Invasif yang diperjualbelikan di Kota Padang dan Bukittinggi Hasil Pemetaan Jenis Agen Hayati yang Bersifat Invasif (JABI) Stasiun KIPM Padang Tahun 2023
- Lampiran 5. Hasil pemeriksaan Laboratorium pada Pemantauan PIK 2023
- Lampiran 6. Hasil Pengujian Laboratorium Sampel INPRES 01 Tahun 2023 Stasiun KIPM Padang
- Lampiran 7. Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2023

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan simplifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan perundangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, birokrasi dan orientasi pelayanan dari dua institusi yaitu Karantina Ikan dan Laboratorium Pembinaan serta Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Dilatarbelakangi masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan, diperlukan langkah dan strategi untuk menciptakan sinergitas dua institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang masing-masing berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumberdaya, pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari sistem perdagangan, menjadi satu organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang.

Adapun dasar pemikiran yang melatar belakangi perlunya suatu Badan yang dapat mengakomodir fungsi karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan, antara lain;

1. Konsekuensi Trend Globalisasi

Kesepakatan GATT (sekarang WTO) yang merekomendasikan penghapusan secara bertahap subsidi domestik, subsidi ekspor, serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar (perizinan, kuota, tarif, penunjukan importir terbatas, dll) telah melahirkan kesadaran baru bagi negara-negara di dunia akan arti pentingnya peran aturan-aturan teknis, khusus karantina ikan, dalam perdagangan internasional produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan di masa mendatang. Dengan dihapuskannya segala macam bentuk subsidi serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar tersebut, diperkirakan bahwa akseptabilitas produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan dalam perdagangan internasional di masa depan akan sangat ditentukan oleh dapat atau tidaknya produk-produk tersebut memenuhi peraturan-peraturan karantina dan ketentuan keamanan pangan yang diterapkan di pasar internasional. Oleh karena itu, sistem perkarantinaan dan keamanan pangan dalam bentuk pengendalian mutu di masa depan harus dapat melaksanakan dua fungsi yang sangat strategis sekaligus, yaitu sebagai subsistem perlindungan sumber daya alam hayati dan sebagai instrumen dalam perdagangan internasional.

Didorong oleh kesadaran tersebut, banyak negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang kemudian berupaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan agar tidak dirugikan dalam era perdagangan bebas. Upaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan tersebut dapat ditempuh melalui pembenahan terhadap semua

aspek yang terkait dengan sistem tersebut, khususnya aspek: 1) Regulasi dan peraturan perundangan; 2) kelembagaan; 3) Sumber Daya Manusia; 4) sarana prasarana; dan 5) teknologi dan metodologi.

Dalam organisasi pengendalian hama penyakit ikan, Indonesia telah meratifikasi dan menjadi salah satu anggota Office International Des Epizooties (OIE), salah satu badan/organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani bidang kesehatan hewan (termasuk ikan) di dunia. Lembaga ini mempunyai kewenangan pengaturan dan penerbitan berbagai kesepakatan tentang mekanisme, prosedur-prosedur dan standar-standar internasional bidang kesehatan hewan (termasuk ikan). Oleh karena itu Sertifikat Kesehatan Ikan yang diterbitkan oleh unit pelaksana teknis karantina ikan diakui dan dapat berperan sebagai penjaminan kualitas produk perikanan (Quality Assurance). Karantina ikan berperan pula sebagai faktor penentu akseptabilitas komoditas perikanan Indonesia di pasar internasional, sebagai bagian dari Trade Facilitation pada kegiatan ekspor dan impor media pembawa HPIK. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ Health certificate (HC), pada saat ini berperan sebagai penjamin kualitas produk perikanan (quality quarantine).

Peningkatan sistem budidaya disertai perluasan area budidaya mendorong meningkatnya lalulintas komoditas perikanan baik antar negara maupun antar area di wilayah Negara Republik Indonesia, kondisi ini memberikan dampak meningkatnya pemunculan jenis-jenis penyakit ikan baru yang berpotensi menyebar dari satu negara ke negara lainnya

ataupun antar area. Sejalan dengan ini kerjasama internasional untuk melestarikan sumberdaya alam hayati ikan dalam arti luas dan khususnya dari serangan HPIK melahirkan tuntutan permintaan persyaratan negara tujuan ataupun daerah tujuan untuk memberikan jaminan bahwa komoditi perikanan /media pembawa yang dilalulintaskan bebas HPIK, hal ini merupakan tantangan dan mendorong karantina ikan untuk berperan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan pencegahan /perlindungan sumber daya ikan dari ancaman penyakit ikan. Selain hal-hal tersebut, karantina ikan saat ini dihadapkan pada beberapa posisi strategis lain yaitu:

Meningkatnya tanggung jawab karantina ikan untuk mengimplementasikan sistem elektronik dalam kerangka National Single Window (NSW) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, merupakan realisasi dari rencana antisipatif pembangunan kelembagaan karantina ikan yang dinilai paling ideal untuk menyongsong tugas dan misi yang akan diemban di era perdagangan global nanti. Melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang memberi mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat terpadu, diharapkan dapat diciptakan suatu sistem yang sinergi dengan kesepakatan-kesepakatan internasional (antara lain SPS Agreement, Office International des Epizooties (OIE), Codex Alimentarius Commission,

Convention Bio Diversity, dll) ataupun merupakan solusi terhadap permasalahan pengendalian mutu hasil perikanan dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan.

2. Isu Strategis yang bersifat nasional maupun global

Adanya isu strategis yang bersifat nasional maupun global juga menjadikan bahan pemikiran terbentuknya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Isu strategis tersebut antara lain:

- a. Luas pantai Indonesia yang sangat panjang dengan ribuan pulau dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib periksa karantina ikan.
- b. Keamanan pangan (Food Safety) dan keamanan hayati (Biodiversity) sebagai isu global yang sangat strategis untuk menghambat masuknya pangan dan sumber daya alam hayati ke suatu Negara.
- c. Akses pasar produk perikanan tidak dapat ditembus apabila tidak adanya jaminan kualitas (Quality Assurance).

Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 220 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar potensial bagi negara-negara produsen produk perikanan. Produk perikanan tersebut telah memasuki pasar Indonesia, yang sangat memungkinkan membawa hama dan penyakit ikan karantina. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan terancam secara global. Setiap Negara telah berbenah diri dengan menyiapkan berbagai strategi dan manuver–manuver untuk dapat

memanfaatkan peluang dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Selain berorientasi terhadap perlindungan sumber daya alam Indonesia, perluasan akses pasar melalui peningkatan ekspor juga menjadi fokus perhatian.

3. Dukungan dan Permintaan Legislatif (DPR)

Dukungan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat kelembagaan karantina ikan dalam rangka melindungi sumber daya ikan Indonesia merupakan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan status kelembagaan karantina ikan. DPR menilai fungsi lembaga Karantina Ikan sebagai salah satu benteng pertahanan dan perlindungan sumber daya ikan saat ini cukup signifikan namun dengan rentang kendali yang bersifat luas, nasional, dan strategis dibutuhkan satu lembaga yang lebih kuat dan mempunyai posisi kebijakan strategis, selain itu pula direkomendasikan bahwa Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumber daya perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna, sekaligus melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan. Oleh karenanya direkomendasikan untuk pembentukan suatu lembaga karantina Ikan yang terpadu dengan lembaga pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan

4. Alasan Efisiensi dan Efektifitas

Aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan sertifikasi secara terpadu sebagai penjaminan kualitas produk perikanan (Quality Assurance) dalam rangka meningkatkan akses pasar produk perikanan. Trend Internasional bahwa penjaminan kesehatan dan mutu produk perikanan berada dalam satu lembaga dalam rangka harmonisasi dan standardisasi, sebagai contoh:

Australia: AQIS (Australia Quarantine Inspection Service);

Korea: NFIS (National Fisheries Products Inspection Service);

China: AQSIQ (Administration Quality Supervision Inspection and Quarantine); dll

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kurangnya keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus ditangani. Badan karantina ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan melaksanakan keterpaduan dalam pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan Karantina, pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Karena itu BKIPM merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar dalam hal-hal tertentu, dapat mengambil keputusan tanpa terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan organisasi yang terpisah, apabila hal itu memang dipandang perlu dalam rangka penerapan Good Quarantine Practice serta demi kepentingan nasional yang lebih luas. Selain itu, pendistribusian fungsi penyelenggaraan pelayanan sertifikasi

kesehatan kepada dua institusi, justru berpotensi untuk menimbulkan inefisiensi sumber daya, proliferasi birokrasi, konflik kepentingan, memperlemah sinergi sistem SPS, mempersulit representasi Indonesia di forum nasional dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan mutu hasil perikanan.

5. Sistem Manajemen Mutu

Sebagai salah satu amanat peraturan perundangan yang berlaku khususnya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan perikanan dan dalam rangka menghadapi tuntutan penerapan Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh negara mitra atau negara tujuan ekspor yang saat ini semakin ketat harus didukung dengan penerapan sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu tersebut harus terintegrasi dan mencakup seluruh tahapan produksi mulai hulu sampai hilir termasuk laboratorium sebagai penunjang, untuk menjamin efektifitas, konsistensi, dan integritas dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability. Pengembangan dan penerapan sistem tersebut harus dipastikan equivalen dengan ketentuan yang berlaku secara internasional dan negara mitra atau negara tujuan ekspor tertentu. Sistem tersebut merupakan acuan Otoritas Kompeten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan jaminan bebas hama penyakit ikan. Selain itu tuntutan mengenai konsistensi dan integritas sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability, secara jelas dituangkan dalam ketentuan yang diberlakukan oleh negara

mitra khususnya Uni Eropa (UE) dalam peraturan (Comission Decission) CD 178, CD 852, CD 853, CD 854, dan CD 882 yang berkaitan dengan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Tuntutan tersebut telah direspon oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan Otoritas Kompeten melalui pasal 4 Permen KP 01/Men/2007. Otoritas kompeten tersebut mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada seluruh tahapan produksi, pengolahan dan distribusi. Otoritas kompeten tersebut telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001;2015 dan telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, meskipun masih terbatas pada ruang lingkup tertentu

Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dibentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut BKIPM, yang diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumberdaya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi merugikan melalui tindakan karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor ataupun yang diekspor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ditetapkan dibentuk suatu Badan setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, **Permen KP No. 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan** sebagaimana telah diubah ke **PERMEN KP No 49/Permen-KP/2020** ditetapkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melaksanakan tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta Keamanan Hayati Ikan.

Dalam menjalankan perannya, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan wujud dalam menjalankan visi dan misi terhadap peningkatan sektor perikanan yang berorientasi terhadap perlindungan sumberdaya perikanan, keamanan pangan dan pelayanan masyarakat.

Kedudukan UPT BKIPM ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas dan kantor pos, berperan penting dalam mencegah masuk tersebarnya hama penyakit ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan. Keberadaan karantina ikan di bandar udara diatur dalam annex 9 tentang fasilitasi (fasilitation) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation) Sedangkan di pelabuhan laut diatur dalam Organisasi Kemaritiman Internasional (IMO).

Selain 46 UPT yang tugas dan fungsinya ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah, pelaksanaan tugas fungsi BKIPM

didukung pula oleh Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) dan Pengembangan Teknik Dan Metode Pengujian yang melaksanakan tugas : melaksanakan Pengujian Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keamanan Hayati Ikan dalam rangka Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keamanan Hayati Ikan

Stasiun KIPM Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban Visi **“Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”**.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka misi yang diemban adalah ”Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, aman Konsumsi dan Terpercaya”.

Stasiun KIPM Padang sebagai filter masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina serta menjamin ikan aman konsumsi, mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis. Berdasarkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang mempunyai Tugas pokok

“Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan”.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban dan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan teknis/operasional dan kegiatan administrasi/ketatausahaan serta keuangan dilingkup Stasiun KIPM Padang dan perkembangan-perkembangan yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuannya adalah sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja Stasiun KIPM Padang sesuai dengan tugas dan fungsi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB II
PROFIL STASIUN KIPM PADANG

2.1 Umum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina ikan Pengendalian Mutu ,dan Keamanan Hasil Perikanan memiliki tugas pokok : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

▶▶▶ Susunan Organisasinya, Kepala Stasiun KIPM Padang membawahi :

- ▶▶▶ a. Kepala Urusan Umum (Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial);
- ▶▶▶ b. Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- ▶▶▶ c. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- ▶▶▶ d. Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- ▶▶▶ e. Kelompok Jabatan Fungsional

Wilayah kerja Stasiun KIPM Padang meliputi seluruh wilayah di Sumatera Barat yang terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten. Mengingat luasnya wilayah kerja dan dalam upaya meningkatkan pengawasan arus lalu lintas komoditi perikanan dari dan ke wilayah Sumatera Barat, maka Stasiun KIPM Padang membuka wilayah kerja layanan operasional dan pengawasan.

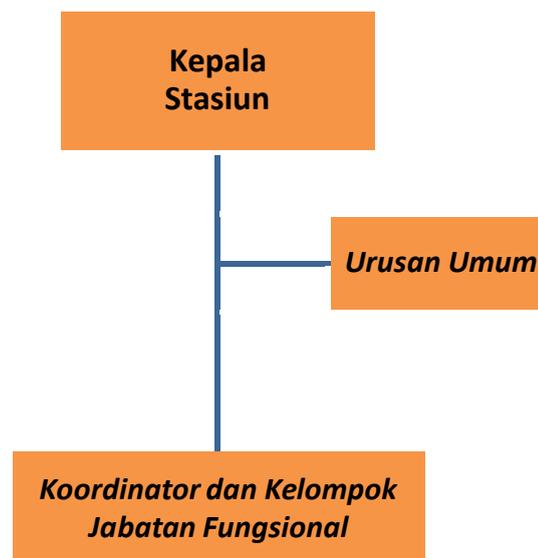
Selama terbentuk, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang terus menunjukkan konsistensi dan profesionalisme dalam melakukan tindakan karantina dan siap berkontribusi serta meingkatkan pengawasan perkarantinaaan dan mutu hasil perikanan dalam peningkatan daya saing produk perikanan dalam negeri.

2.2 Tugas dan Fungsi

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina ikan Pengendalian Mutu ,dan Keamanan Hasil Perikanan memiliki tugas pokok : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

2.3 Struktur Organisasi

Peraturan Menteri yang baru tentang Struktur organisasi setelah dilakukannya penyetaraan jabatan Administrasi yang berlaku saat ini Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang

**BAB III
KEGIATAN OPERASIONAL**

3.1 Umum

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Hingga bulan Oktober tahun 2022 Stasiun KIPM Padang memiliki 3 (tiga) Wilayah Kerja, yaitu (1) Wilker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus - Padang, (2) Wilker Kepulauan Mentawai dan (3) Wilker Air Bangis - Pasaman Barat. Namun pada bulan Oktober 2022 Wilayah Kerja Air Bangis yang berada Kabupaten Pasaman Barat ditutup. Hal ini dikarenakan Wilayah Kerja Air Bangis tidak berada di pintu masuk dan/atau keluar komoditi perikanan Sumatera Barat melainkan berada di TPI (Tempat Pendaratan Ikan) Air Bangis. Oleh karena itu, Stasiun KIPM Padang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya guna mengantisipasi hal tersebut, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik.

3.2 Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi oleh Stasiun KIPM Padang bertujuan untuk penyampaian informasi mengenai kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengendalian keamanan hayati perikanan sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan keberadaan dan pentingnya Stasiun KIPM Padang di Sumatera Barat.

Selama Tahun 2023 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang terus melanjutkan kegiatan sosialisasi dengan menyebarkan informasi berupa surat edaran, publikasi di sosial media ataupun dilakukan secara langsung khususnya kepada pengguna jasa, pembudidaya ikan, unit pengolahan ikan serta kelompok tani dengan cara memberi penjelasan dan informasi terbaru terkait dengan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati perikanan.

3.3 Kegiatan Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama

Sepanjang tahun anggaran 2023, Stasiun KIPM Padang melakukan penyebaran informasi melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi non formal seperti kegiatan coffee morning dengan pengguna jasa, poster informasi PNBPN, poster Alur Prosedur karantina ikan (Domestik Masuk, Domestik Keluar dan Ekspor) dengan harapan kedepannya masyarakat akan semakin sadar dan mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi Stasiun KIPM Padang di Sumatera Barat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Stasiun KIPM Padang beserta lingkup Wilayah kerjanya tidak lepas dari kerjasama dengan berbagai pihak antara lain :

1. Dalam rangka mendukung terlaksananya Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalulintas komoditi hasil perikanan dari Sumatera Barat melalui Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap - Mentawai, telah dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait diantaranya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sumatera Barat, Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang, PT. ASDP Cabang Padang, Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Padang, pihak Administrator Pelabuhan, KP3 dan KSDA Sumatera Barat serta Assosiasi Buruh Pelabuhan.

2. Dalam hal mensosialisasikan beberapa peraturan dan perundangan yang berlaku dan pembinaan pencegahan penyakit ikan terhadap petani/nelayan bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
3. Dilingkup Bandara Internasional Minangkabau, kerjasamanya dengan pihak bandara dalam bentuk koordinasi pengaturan sistem keluar masuknya komoditi perikanan di bandara sehingga semua komoditi perikanan tidak akan masuk dan keluar dari bandara tanpa sepengetahuan petugas karantina ikan dan Satuan Tugas KSDA Padang Serta Instansi lainnya terkait lalulintas komoditi yang dibatasi, dilarang dan dilindungi.

3.4 Penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan menggunakan Dokumen Terintegrasi (SNI ISO 9001 : 2015, SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dan SNI ISO/IEC 17020 : 2012)

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Stasiun KIPM Padang dilaksanakan dengan menggunakan Dokumen Panduan Mutu yang terintegrasi dari 3 (tiga) Dokumen Mutu. Dokumen Panduan Mutu Integrasi ini merupakan pedoman utama bagi personel Laboratorium Penguji, Lembaga Inspeksi dan Pelayanan Sertifikasi pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang dalam melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 dan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 berbasis SNI ISO 9001:2015. Stasiun KIPM Padang dengan konsisten melaksanakan audit internal sebagai evaluasi mengenai penerapan sistem manajemen terintegrasi.

3.4.1 Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015

Layanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Reformasi birokrasi mengamanatkan 3 (tiga) parameter fungsi yang terkait pelayanan publik.

Stasiun KIPM Padang berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan memberikan kualitas kinerja tertinggi kepada pengguna jasa tanpa keluar dari peraturan karantina ikan itu merupakan motto utama dari Stasiun KIPM Padang pada stakeholder atau pengguna jasa karantina ikan.

Sebagai janji pelayanan BKIPM adalah memberikan pelayanan yang bermutu professional, beretika dan bertanggung jawab; berkomitmen untuk bersikap sopan, ramah, empati dan tegas; bersikap dan bertindak proaktif, kooperatif, transparan dan jujur; berperilaku bersih, rapi, indah, tertib dan disiplin.

Manfaat implementasi sertifikasi ISO 9001: 2015 bagi Stasiun KIPM Padang yaitu memberikan penilaian positif terhadap reputasi organisasi. Sistem implementasi sertifikasi ISO 9001: 2015 menekankan pada proses bisnis (pelayanan) yang berfokus pada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

3.4.2 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017

Akreditasi laboratorium adalah pengakuan formal terhadap suatu laboratorium untuk melakukan pengujian atau kalibrasi tertentu sesuai dengan metode standar tertentu dengan manajemen mutu dan cara berlaboratorium yang baik. Manfaat yang didapat dari kegiatan akreditasi ini adalah

1. Pengurangan resiko memungkinkan laboratorium untuk menentukan apakah melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku,
2. Komitmen untuk semua personil laboratorium sesuai dengan kebutuhan pengguna,
3. Evaluasi berkala dari badan akreditasi akan memberikan titik acuan untuk menjaga persaingan,

4. Terus menerus perbaikan sistem manajemen laboratorium,
5. Terus menerus pengembangan keterampilan analis melalui program pelatihan dan evaluasi efektivitas,
6. Meningkatkan citra dan kepercayaan serta meningkatnya kepuasan pelanggan/pengguna jasa,
7. Pengakuan internasional, melalui perjanjian saling pengakuan antar badan akreditasi di berbagai negara,
8. Akses kepelanggan baru, sebagai pengakuan internasional menurunkan biaya produsen dan eksportir untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk bukti di negara lain,
9. Peningkatan produktivitas laboratorium, pengurangan pengulangan dari kalibrasi dan/atau pengujian,
10. Meningkatkan keterampilan personil, pengurangan kesalahan, pengurangan pengaduan dan keluhan pelanggan.

Pada bulan Januari 2018, Stasiun KIPM Padang secara resmi melakukan *upgrade* standar terbaru ISO/IEC 17025 untuk versi 2017 menggantikan ISO/IEC 17025:2008, dan telah dilakukan Survailen I pada 16 November 2022. Adapun ruang lingkup Laboratorium Uji SKIPM Padang pada tahun 2023, yaitu : **Parasit (2)** : *Gyrodactylus sp*, *Myxobolus*; **Jamur (1)** : *Aphanomyces invadans*; **Bakteri (6)** : *Yersinia ruckerii*, *Edwardsiella tarda*, *Edwardsiella ictaluri*, *Aeromonas salmonicida*, *Aeromonas hydrophila*, dan *Vibrio parahaemolyticus* varian AHPND ; **Virus (5)** : *White Spot Syndrome Virus (WSSV)*, *Megalocytivirus*, *Koi Herpes Virus (KHV)*, *Infectious Haematopietic Necrosis Virus (IHNV)/Rhabdovirus*, *Epizootic Haematopietic Necrosis Virus (EHNV)*; **Mutu (4)** : Organoleptik, *Salmonella*, Coliform dan ALT; **Kimia (1)** : Formalin.

3.4.3 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020 : 2012

Parameter inspeksi dapat mencakup hal-hal mengenai kualitas, kuantitas, keamanan, kelaikan untuk digunakan serta pemenuhan secara terus menerus atas keamanan instalasi atau sistem yang beroperasi.

Adapun ruang lingkup Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Padang pada tahun 2023 dan telah dilakukan asesmen dalam rangka Reakreditasi pada tanggal 27 - 28 November 2023, yaitu:

- Penilaian Instalasi Karantina Ikan (IKI)
- Inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
- Surveilen HACCP

3.5 Kegiatan Operasional Pelayanan dan Laboratorium

Kegiatan laboratorium dapat berjalan baik apabila kegiatan tersebut dikoordinir secara baik dan memiliki prosedur pelayanan yang jelas dan benar. Laboratorium Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang merupakan laboratorium diagnosa hama dan penyakit ikan karantina dan penjaminan mutu hasil perikanan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan kegiatan berupa;

- Pemeriksaan parasitologi, Mikrobiologi dan Virologi serta Mikologi dengan menggunakan metode konvensional (morfologis dan atau uji biokimia serta uji PCR).

- Pelaksanaan tindakan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam Pelayanan sertifikasi Kesehatan Ikan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Padang memiliki ruang laboratorium pengujian yang digunakan untuk pemeriksaan HPI/HPIK. Adapun ruang laboratorium pengujian telah dibagi menjadi laboratorium parasit, mikologi dan histologi, laboratorium bakteri dan atau bakteri mutu, laboratorium virus, organoleptik dan laboratorium pembuatan media dan sterilisasi.

Pemeriksaan secara laboratoris yang telah dilakukan di Stasiun KIPM Padang meliputi pemeriksaan atas sampel media pembawa perikanan yang dilalulintaskan baik ekspor, domestik keluar dan domestik masuk dan sampel non rutin atas permintaan dari pengguna jasa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengujian sampel monitoring, inspeksi dan Surveilans.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pengguna jasa, maka laboratorium Stasiun KIPM Padang berusaha untuk menjadi laboratorium yang mandiri dan profesional yang memenuhi persyaratan teknis maupun menerapkan system mutu yang baik sesuai dengan standar nasional maupun internasional dan terakreditasi.

Beberapa hambatan yang dialami laboratorium penguji Stasiun KIPM Padang yaitu :

- Belum tersedianya peralatan pengujian yang dapat dilakukan secara realtime khususnya pada pengujian HPIK.

- Keterbatasan peralatan pengujian penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan dimana belum tersedianya peralatan pengujian mikologi secara khusus dan belum memadainya peralatan pendukung untuk pemeriksaan pengujian bio-kimia dalam hal ini pengujian logam berat, histamin dan pengujian mutu lainnya.
- Keterbatasan jumlah tenaga fungsional pengendali hama dan penyakit ikan (PHPI) sehingga harus merangkap untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan pengawasan di lapangan serta pemeriksaan laboratorium berupa pengujian penyakit ikan karantina dan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

3.6 Kegiatan Sertifikasi Kesehatan Ikan

Kegiatan operasional di Stasiun KIPM Padang untuk Tahun 2023 yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan Sertifikasi Ekspor (HC Mutu), Sertifikasi Domestik Keluar Dan Domestik Masuk. Kegiatan tersebut ada yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan baik volume maupun jumlah frekuensi.

3.6.1 Sertifikasi Ekspor

Jumlah frekuensi sertifikasi kegiatan Ekspor yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak **62** kali dengan volume komoditi hidup sebanyak **195.651 Ekor** dan komoditi non-hidup sebesar **124.804,98 Kg** dan total nilai komoditi sebesar **Rp 19.766.059.092,-** yang terdiri dari komoditi hidup, komoditi beku dan komoditi kering (**Lampiran 1**).

Sedangkan Ekspor untuk 2022 sebesar **35 Kali** dengan jumlah dengan volume sebesar **144.418,6 Kg** dan nilai komoditi sebesar **Rp 29.817.651.647,-**. Berdasarkan data Ekspor komoditi perikanan diatas, secara keseluruhan tidak terjadi penurunan yang signifikan. Jenis media pembawa yang dominan diekspor melalui Stasiun KIPM Padang antara lain: tuna beku, ikan kerapu hidup, ikan hias laut, ikan garing segar/beku, dan benih ikan garing.

Adapun Unit Pengolah Ikan (UPI) yang melakukan Ekspor merupakan UPI yang telah tersertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) dengan Grade A. Sebagaimana peraturan yang ada bahwa salah satu syarat Unit Pengolah Ikan untuk bisa melakukan kegiatan ekspor adalah UPI yang telah menerapkan dan memperoleh sertifikat HACCP yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten dalam hal ini BKIPM dimana UPI tersebut sebelumnya telah memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat.

3.6.2 Sertifikasi Domestik Keluar

Kegiatan Sertifikasi Kesehatan Ikan Domestik Keluar di Stasiun KIPM Padang pada tahun 2023 sebanyak **3.169 kali** dengan volume komoditi hidup sebanyak **1.973.869 Ekor** dan komoditi non-hidup sebesar **584.410 kg** dengan nilai komoditi sebesar **Rp 82.904.545.467,-**. Untuk Tahun 2022 diketahui jumlah Frekuensi lalulintas domestik keluar di Stasiun KIPM Padang sebanyak **3.884** kali dengan volume hidup sebanyak **1.773.320 Ekor** dan non-hidup sebesar **780.69,50 kg** dengan nilai komoditi sebesar **Rp 109.203.383.000,-**.

Secara keseluruhan terjadi penurunan dari segi frekuensi, volume komoditi non hidup dan nilai komoditi, namun terjadi peningkatan yang signifikan pada volume komoditi hidup. Data kegiatan sertifikasi lalulintas Domestik Keluar tahun anggaran 2023 Stasiun KIPM Padang dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Jenis media pembawa yang dominan dilalulintaskan antar area (Domestik Keluar) yang melalui Stasiun KIPM Padang beserta lingkup Wilayah Kerjanya antara lain : lobster, ikan hias laut, ikan hias air tawar, lobster air tawar dan ikan betutu.

Pemeriksaan kesehatan ikan untuk pengeluaran domestik, pemeriksaan tahap awal dilakukan di lapangan yaitu pada farm-farm pelaku usaha dan selanjutnya pemeriksaan secara laboratoris di laboratorium uji baik parasit maupun bakteri untuk mengetahui apakah ikan tersebut benar-benar bebas dari hama dan penyakit ikan karantina yang berbahaya.

Daerah tujuan lalu lintas media pembawa perikanan untuk domestik keluar tahun 2023 antara lain Jakarta, Batam, Denpasar, Surabaya, Pontianak, Tanjung Pinang dan Palembang.

3.6.3 Domestik Masuk

Proses pemeriksaan terhadap media pembawa perikanan dalam kegiatan lalu lintas domestik masuk meliputi pemeriksaan klinis, jenis, jumlah, ukuran dan pemeriksaan kelengkapan maupun keabsahan dokumen karantina dari daerah asal. Tujuannya adalah untuk melindungi sentra-sentra produksi perikanan di daerah pemasukan dari serangan hama dan penyakit ikan yang berbahaya dari daerah asal.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang selama tahun 2023 mengadakan pengawasan dan sertifikasi kesehatan ikan kegiatan lalulintas domestik masuk yang frekuensinya sebanyak **904 kali** dengan volume sebesar **143.804.215 Ekor** (hidup) dan **57.853 Kg** (non-hidup) dengan total nilai **Rp. 36.485.998.600,-**. Sedangkan pada tahun 2022 domestik masuk sebanyak **273.662.190 Ekor** dan **508 Kg** Non hidup dengan frekuensi **801 kali** dan nilai komoditi **Rp. 41.946.543.960,-**. Data kegiatan sertifikasi lalulintas Domestik Masuk tahun anggaran 2023 Stasiun KIPM Padang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

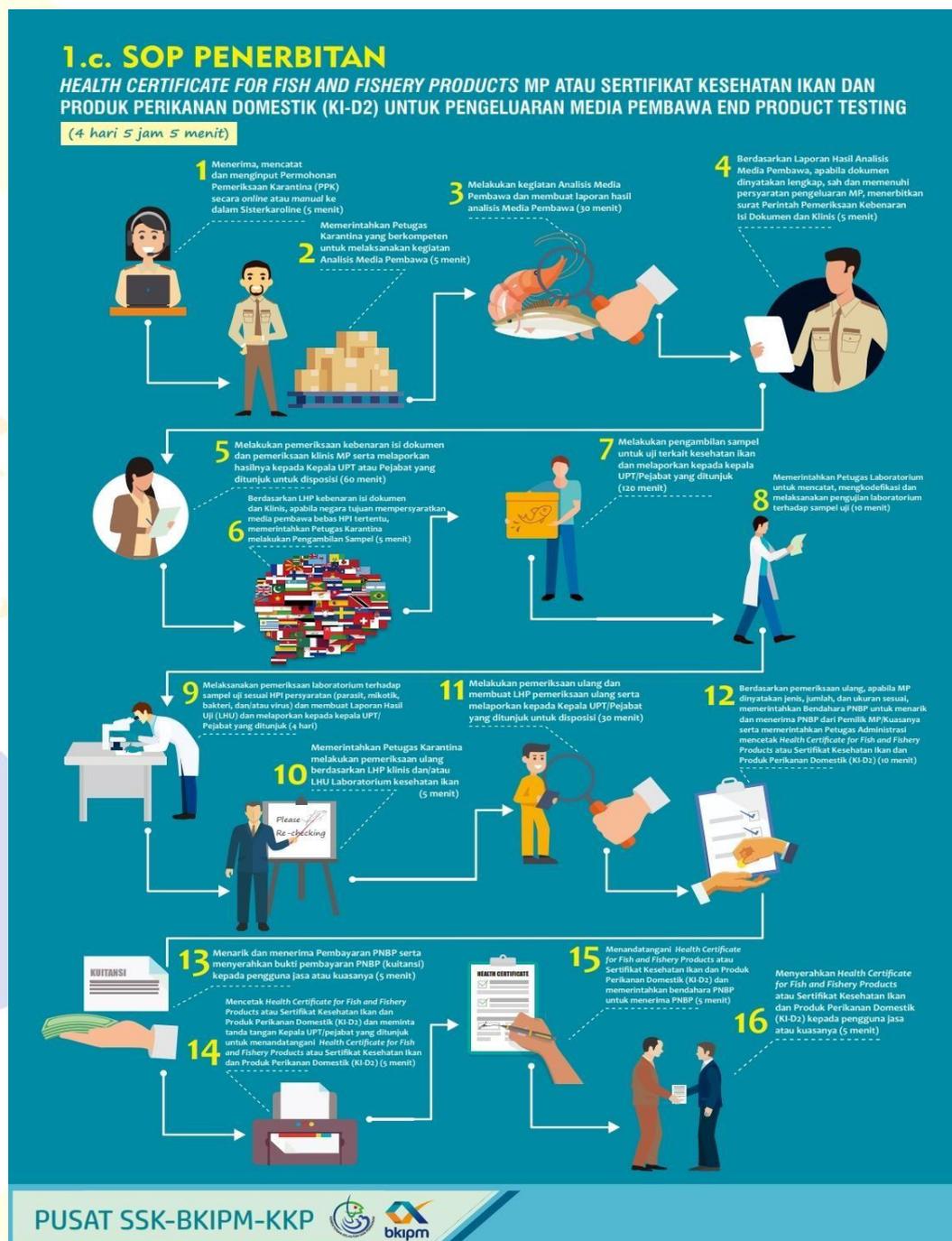
Data lalulintas media pembawa perikanan untuk domestik masuk dominan pada tahun 2023 berasal dari daerah Surabaya dan Jakarta. Komoditi yang dominan dilalulintaskan meliputi ikan hias air tawar dan benur vaname.

3.7 Tindakan Karantina Ikan (8P) Dan Kasus Pelanggaran

3.7.1 Tindakan Karantina Ikan (8P)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi karantina ikan yang didalamnya terdapat Tindak Karantina Ikan (8P) yang terdiri dari : Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang beserta lingkup Wilayah Kerjanya sudah seoptimal mungkin melaksanakan tindak karantina ikan selama tahun 2023.

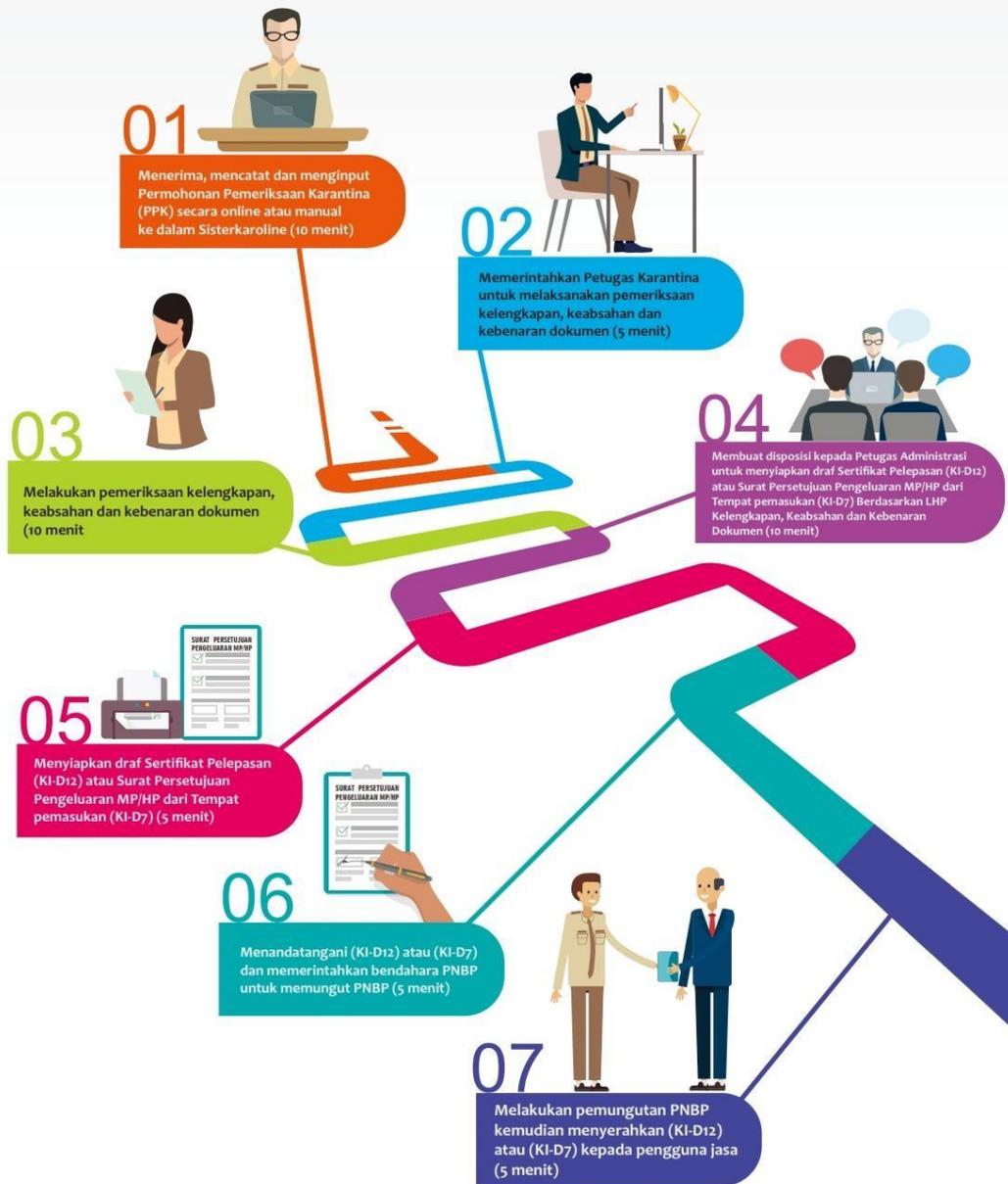
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan dan pemeriksaan laboratorium, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang mengacu kepada Standar Pelayanan BKIPM sesuai Surat Keputusan Kepala BKIPM No 82 thn 2019 yang dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK SK Kaban 82 thn 2019

3. SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk

(50 menit)



PUSAT SSK-BKIPM-KKP



Gambar 3. Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa HPI/HPIK SK Kaban 82 thn 2019

3.7.2 Kasus Pelanggaran

Pelaksanaan penegakan kedaulatan peraturan dan perundangan perkarantinaan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Stasiun KIPM Padang dilakukan melalui pengawasan pemenuhan persyaratan pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kasus pelanggaran yang sering terjadi diantaranya media pembawa tidak dilengkapi dengan dokumen karantina, merupakan hewan yang dilindungi, ataupun tidak sesuai dengan aturan terkait lainnya. Selama tahun 2023 terdapat dua kasus pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kasus pertama yaitu ditemukan 1 (satu) ekor lobster bertelur dalam keadaan hidup yang akan dilalulintaskan ke Jakarta pada tanggal 09 Maret 2023. Nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut adalah Rp 200.000,-. Tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran tersebut dengan dilakukan pembinaan.

Kasus kedua yaitu ditemukan 1 (satu) ekor lobster di bawah ukuran dan 4 (empat) ekor lobster bertelur dalam keadaan hidup yang akan dilalulintaskan ke Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023. Nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut adalah Rp 500.000,-. Tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran tersebut dengan dilakukan pembinaan.

3.8 Pemantauan Daerah Sebar HPI/HPIK

Berdasarkan Kepmen nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang status penetapan area tidak bebas penyakit ikan karantina di wilayah Negara Republik Indonesia, Ruang lingkup pemantauan HPI/HPIK Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang meliputi kawasan perikanan budidaya air tawar/laut dan payau, kawasan perikanan budidaya berpotensi sebagai media pembawa HPI/HPIK.

Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina Tahun 2023 dilaksanakan pada 2 tahapan kegiatan, pemantauan Tahap I dilaksanakan pada bulan Februari dan Tahap II dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2023. Kegiatan Pemantauan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terutama di daerah – daerah yang merupakan sentra budidaya ataupun daerah yang memiliki area perairan umum (tawar, payau maupun laut). Tujuh wilayah tersebut antara lain: Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengambilan contoh uji dilakukan dengan memperhatikan target media pembawa dan target uji PIK yang telah ditentukan. Contoh uji dapat diambil dari ikan yang menunjukkan gejala sakit maupun tidak menunjukkan gejala sakit. Prosedur pengambilan contoh uji pada Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK) tahun 2023 diambil dengan Sistem Pool. Metode pengambilan dengan Sistem Pool digunakan untuk menetapkan status bebas suatu penyakit pada zona/wilayah/kompartemen tertentu. Penentuan besaran contoh uji pada suatu populasi berdasarkan

menggunakan pendekatan tingkat akurasi 95% dan error 5%. Sesuai keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. 32/Kep-BKIPM/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan HPI/HPIK, sebagai perhitungan awal asumsi prevalensi ditetapkan sebanyak 15%, untuk kegiatan pemantauan tahun ini prevalensi diambil berdasarkan hasil yang akan didapat dari perhitungan prevalensi tahun lalu yaitu 15%.

Hasil yang didapat dari kegiatan pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, ditemukan PIK golongan bakteri yaitu *Aeromonas salmonicida* pada ikan mas di Kabupaten Agam tapi pada pemantauan periode II pada sampel ikan dan lokasi yang sama hasilnya negatif. Pada pemantauan PIK tahun ini tidak ditemukan penyakit ikan air Laut baik dari golongan bakteri maupun dari golongan virus yang menjadi target PIK tahun 2023.

3.9 Pemantauan Jenis Agen Hayati yang Bersifat Invasif (JABI)

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1994, Indonesia mempunyai kewajiban dalam mengatasi isu terkait dengan introduksi spesies asing sebagaimana tertuang dalam artikel 8(h) CBD yang mewajibkan setiap negara untuk melakukan pemusnahan, pengawasan dan dampak dari spesies asing invasif (Invasive Alien Species) dengan berpedoman pada ketentuan perundangan dan pedoman pada tingkat nasional, regional dan internasional.

Beberapa instrumen yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membatasi dan mencegah introduksi serta penyebaran spesies asing, antara lain melalui peraturan yang terkait dengan perkarantinaan dan peraturan pemerintah terkait dengan AMDAL, namun belum cukup dalam menangani permasalahan introduksi spesies asing(invasif).

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang melalui kegiatan pemetaan sebaran jenis agen hayati yang bersifat invasif (JABI) di wilayah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan pemetaan sebaran jenis ikan invasif sebanyak 2 (dua) kali, adapun pelaksanaan kegiatan pemetaan JABI di Kota Padang tahap I pada tanggal 27 Februari 2023 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023, pelaksanaan Pemetaan JABI di Kota Bukittinggi dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 10 Maret 2023 dan tahap II pada tanggal 20 s.d 21 Juli 2023. Titik pengambilan sampel pada kegiatan pemetaan sebaran JABI dilaksanakan di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Berdasarkan petunjuk teknis Pusat Karantina Ikan bahwa kegiatan survei pemetaan JABI dapat dilakukan di sentra penjualan ikan hias, karena tempat tersebut berpotensi menjadi titik masuknya ikan eksotis yang bersifat invasif.

Dalam pelaksanaan Pemetaan Daerah Sebar JABI tahun 2023 data yang dikumpulkan akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke toko – toko sentra penjualan ikan hias di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Wawancara dalam kegiatan ini berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara

langsung informasi atau keterangan. Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan berdasarkan daftar isian kuisisioner.

Observasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi partisipan dimana orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam obyek yang diamati. Selain itu kegiatan ini juga didukung dengan studi literatur, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tinjauan perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Selama pelaksanaan kegiatan pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif Tahap I di sentra penjual ikan hias ditemukan Ikan invasif yang termasuk dalam PERMEN KP No. 19 Tahun 2020 di Kota Padang sebanyak 296 ekor, dengan jenis terbanyak adalah ikan Sapu - Sapu (152 ekor) dan sebanyak 216 ekor, dengan jenis terbanyak adalah ikan Sapu – Sapu (160 ekor) di Kota Bukittinggi.

Selama pelaksanaan kegiatan pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif Tahap II di sentra penjual ikan hias ditemukan Ikan invasif yang termasuk dalam PERMEN KP No. 19 Tahun 2020 di Kota Padang sebanyak 120 ekor, dengan jenis terbanyak adalah ikan Sapu - Sapu (100 ekor) dan sebanyak 180 ekor, dengan jenis terbanyak adalah ikan Sapu – Sapu (100 ekor) di Kota Bukittinggi.

Jenis ikan invasif yang tidak termasuk di dalam PERMEN KP No. 19 Tahun 2020 juga ditemukan di toko – toko ikan hias Kota Padang dan Bukittinggi seperti : Toman (*Channa microleptes*), Zebra (*Amatitlania nigrofasciata*), Hujeta gar (*Ctenolucius hujeta*), Columbia cat fish (*Trachelyopterus fisheri*), Gabus (*Channa asiatica*), Pibass (*Cichla monoculus*), dan Chana Yellow Sentarum (*Channa maruloides*).

Ikan-ikan invasif yang masuk ke Sumatera Barat didatangkan dari Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau melalui ekspedisi kargo jalur darat.

Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Pemetaan JABI di Kota Padang dan Bukittinggi



3.10 Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB)

Stasiun KIPM Padang sampai dengan akhir tahun 2023 memiliki 7 (tujuh) Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang menerapkan CKIB. Instalasi Karantina Ikan tersebut yaitu Blue Oasis Marine yang memiliki dua IKI dengan alamat yang berbeda, CV. Selamat Jaya Aquatic, Satria Utama, UD. Karya Bahari, PT. Multi Daya Jaya dan PT. Dempo Fuyang Aquatic. Terdapat 6 (enam) Instalasi Karantina Ikan yang memiliki Grade B dengan tujuan pengiriman domestik dan ekspor, yaitu Blue Oasis Marine yang memiliki dua IKI dengan alamat yang berbeda, CV. Selamat Jaya Aquatic, UD. Karya Bahari, PT. Multi Daya Jaya dan PT. Dempo Fuyang Aquatic. Sedangkan Instalasi Karantina Ikan Satria Utama yang memiliki Grade C hanya memiliki tujuan pengiriman domestik.

Sepanjang masa berlaku sertifikat CKIB yang dimiliki oleh IKI, Stasiun KIPM Padang tetap melaksanakan Monitoring terhadap konsistensi penerapan CKIB dan dilakukan surveilen dan pengambilan sampel setiap bulan untuk memantau terhadap potensi munculnya hama dan penyakit ikan karantina dan hama penyakit ikan tertentu.

LAPORAN TAHUNAN 2023 SKIPM PADANG

**Tabel 1. Data Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yang disertifikasi
CKIB oleh Stasiun KIPM Padang Tahun 2023.**

No	Nama Perusahaan	Sertifikat IKI		Sertifikat CKIB		Komoditi	Grade	Area/ Negara Tujuan
		Nomor	Masa Berlaku	Nomor	Masa Berlaku			
1.	Blue Oasis Marine	0540/IKI-BKIPM.2/X/2022	12 Oktober 2024	0540/CKIB-BKIPM.2/XII/2022	12 Desember 2024	Ikan Hias Laut	B	DKI Jakarta, Bali / China, Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand
2.	CV. Selamat Jaya Aquatic	0805/IKI-BKIPM.2/III/2022	08 Maret 2024	0805/CKIB-BKIPM.2/III/2022	08 Maret 2024	Ikan Hias Laut	B	DKI Jakarta, Bali, Medan, Batam, Semarang, Yogyakarta, Surabaya / Australia, China, Hongkong, Jepang, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand
3.	Satria Utama	0824/IKI-BKIPM.2/XII/2021	24 Desember 2023	0824/CKIB-BKIPM.2/XII/2021	24 Desember 2023	Lobster	C	Medan, Batam, DKI Jakarta
4.	UD. Karya Bahari	0926/IKI-BKIPM.2/III/2022	11 Maret 2024	0926/CKIB-BKIPM.2/III/2022	11 Maret 2024	Lobster, Kepiting dan Udang Kipas	B	Medan, Batam, DKI Jakarta / Malaysia, Singapura
5.	PT. Multi Daya Jaya	0919/IKI-BKIPM.2/III/2022	08 Maret 2024	0919/CKIB-BKIPM.2/III/2022	08 Maret 2024	Ikan Cupang, Ikan Goby dan Ikan Torpedo	B	DKI Jakarta / China, Jepang, Malaysia, Singapura, Taiwan
6.	PT. Dempo Fuyang Aquatic	0664/IKI-BKIPM.2/XI/2023	28 Desember 2025	0664/CKIB-BKIPM.2/XII/2023	28 Desember 2025	Ikan Kerapu	B	DKI Jakarta / Hongkong, China
7	Blue Oasis Marine	0110/IKI-BKIPM.2/VI/2022	27 Juni 2025	0110/IKI-BKIPM.2/X/2023	05 oktober 2025	Ikan Hias Laut	B	Prov. DKI Jakarta, Prov. Bali dan China, Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Australia, Belgium, Canada, Brazil, Firlandia, Prancis, Hongkong, Irlandia, Iran, Italia, Japan, Korea Selatan

3.11 Inspeksi dan Verifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Sertifikasi HACCP) di UPI dan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada Suplier

Mendukung Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Otoritas Kompeten yaitu : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), melalui Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 19/MEN/2010 tentang “Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan” dan Kepmen No. KEP 52A/MEN/2013 tentang “Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan Distribusi”, serta Peraturan Kepala BKIPM No. PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk aturan operasionalnya.

Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut maka BKIPM melakukan Inspeksi terhadap penerapan SSOP/GMP dan HACCP di Unit Pengelolaan Ikan (UPI) minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk memastikan bahwa UPI menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.

Pada tahun 2023 Stasiun KIPM Padang melaksanakan kegiatan inspeksi dan verifikasi terhadap Unit Pengolah Ikan (UPI) dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

UPI yang telah disertifikasi HACCP pada tahun 2023 sebanyak 4 UPI. Data UPI yang telah disertifikasi HACCP tahun 2023 ditunjukkan pada **tabel 2** dan untuk Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 3** berikut:

Tabel 2. Data Unit Pengolah Ikan (UPI) yang disertifikasi HACCP oleh Stasiun KIPM Padang Tahun 2023.

No	Nama UPI	Nomor Sertifikat	Ruang Lingkup (Grade)	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
1	PT. Duta Perkasa Internasional	101/PM/HACCP /PS/10/22	Fresh Tuna (C)	24 Oktober 2022	24 Oktober 2024
2	PT. Dempo Andalas Samudera	009/PM/HACCP /PS/04/23	Fresh Tuna (A)	03 April 2023	03 April 2025
3	PT. Dempo Andalas Samudera	010/PM/HACCP /PB/04/23	Frozen Tuna (A)	03 April 2023	03 April 2025
4	CV. Amanah Murasaki	016/PM/HACCP /PK/01/23	Dried Salted Fish (C)	13 Januari 2023	13 Januari 2025
5	PT. Lintas Laut Samudera	048/PM/HACCP /PB/07/23	Frozen Tuna (C)	12 Juli 2023	12 Juli 2025
6	PT. Lintas Laut Samudera	227/PM/HACCP /PS/10/23	Fresh Tuna (B)	19 Oktober 2023	19 Oktober 2025
7	CV. Tor Mahseer Sumatera	234/PM/HACCP /PB/02/23	Frozen Freshwater Fish (C)	24 Februari 2023	24 Februari 2025

Selain Sertifikasi HACCP diatas, juga dilakukan sertifikasi penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) terhadap Unit Pengumpul/Suplier. Adapun jumlah Suplier yang disertifikasi CPIB selama tahun anggaran 2023 sebanyak 14 Suplier yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut;

**Tabel 3. Data Unit Suplier yang disertifikasi CPIB Stasiun KIPM
Padang Tahun Anggaran 2023**

No	Nama Supplier	Nomor Sertifikat	Klasifikasi	Ruang Lingkup	Masa Berlaku	Keterangan
1	CV. Davindo Jaya Mandiri	001/CPIB/13/VII/ 2023	Cukup	Ikan Pelagis Beku	28 Februari 2027	Verifikasi
2	PT. Bintang Baru Muda Berjaya	002/CPIB/13/VII/ 2023	Cukup	Ikan Pelagis dan Demersal Beku	31 Mar 2027	Baru
3	UD. Berkah Laut Sejati	003/CPIB/13/VII/ 2023	Cukup	Ikan Beku	31 Juli 2027	Baru
4	PT. Wira Melivid Nusantara	004/CPIB/13/ /VIII/ 2023	Cukup	Tuna Beku	18 Agustus 2027	Baru
5	PT. Wira Melivid Nusantara	005/CPIB/13/ /VIII/ 2023	Cukup	Dori Fillet Beku	18 Agustus 2027	Baru
6	PT. Wira Melivid Nusantara	006/CPIB/13/ /VIII/ 2023	Cukup	Frozen Octopus (Gurita Beku)	18 Agustus 2027	Perpanjangan
7	PT. Wira Melivid Nusantara	007/CPIB/13/ /VIII/ 2023	Cukup	Ikan Layur Beku	18 Agustus 2027	Perpanjangan
8	UD. Maladewa Sea Food	008/CPIB/13/ /VIII/ 2023	Cukup	Ikan Demersal dan Pelagis Segar	31 Agustus 2027	Perpanjangan
9	UD. Dhea Bersaudara	009/CPIB/13/ /VIII/ 2023	Cukup	Ikan Demersal dan Pelagis Segar	31 Agustus 2027	Verifikasi
10	UD. Ikania Tuna	010/CPIB/13/ /X/ 2023	Cukup	Tuna Segar	20 Oktober 2027	Perpanjangan
11	UD. Zaura	011/CPIB/13/ /X/ 2023	Cukup	Ikan Demersal dan Pelagis Potong Segar	31 Oktober 2027	Perpanjangan
12	PT. Camar Laut Mandiri	012/CPIB/13/ /X/ 2023	Cukup	Ikan Beku	30 Oktober 2027	Verifikasi
13	UD. Ikania Tuna	013/CPIB/13/ /XI/ 2023	Cukup	Ikan Pelagis	27 November 2027	Baru
14	Dafril	014/CPIB/13/ /XI/ 2023	Cukup	Fresh Loin Tuna	30 November 2027	Verifikasi

3.12 Monitoring Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (INPRES 01 Tahun 2017)

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta menjalankan fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Stasiun KIPM Padang pada tahun 2023 melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap produk perikanan di sentra penyedia pangan sehat di Kabupaten Pasaman. Sehingga pengawasan terintegrasi dari hulu ke hilir.



Gambar 5. Kegiatan Monitoring Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik

Kegiatan dilaksanakan pada dua (2) semester, semester satu (1) dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2023 dan semester dua (2) dilaksanakan pada bulan September Tahun 2023 di Kabupaten Pasaman dengan 3 lokus. Target pengawasan dan monitoring dilakukan di pasar tradisional.

Adapun lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian mutu pada 3 lokasi di Kabupaten Pasaman, antara lain : Pasar Lubuk Sikaping, Pasar Kumpulan, dan Pasar Panti.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Penilaian Sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene di 3 (tiga) lokasi masuk ke dalam kategori **KURANG** pada semester I maupun semester II. Nilai pengujian produk secara umum yaitu tidak ditemukan tambahan bahan berbahaya formalin dan cemaran mikroba pada ikan segar. Adapun temuan hasil pengujian yang tidak memenuhi standar setelah dilakukan pengujian laboratorium lebih lanjut pada beberapa sampel ikan segar adalah bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella sp.*, dan hasil penilaian organoleptik. Data hasil pengujian sampel INPRES 01 Tahun 2023 Stasiun KIPM Padang dapat dilihat pada **lampiran 6**.

Hasil capaian presentase Jaminan Mutu Keamanan Produk Perikanan di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada semester I Tahun 2023 adalah **51,80%** dalam kriteria yang memenuhi persyaratan dan **48,20%** dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan. Sedangkan pada semester II tahun 2023 adalah **54,40%** dalam kriteria yang memenuhi persyaratan dan **45,60%** dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

3.13 Pengelolaan Sertifikat Kesehatan Ikan

Dalam rangka peningkatan operasional pelayanan publik di bidang perkarantina ikan dan pengujian mutu hasil perikanan, Stasiun KIPM Padang berkomitmen untuk melakukan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan dengan menggunakan aplikasi permohonan secara online melalui

aplikasi PPK Online yang dapat diakses oleh pengguna jasa yang telah terdaftar. Selain itu, dalam rangka transparansi pengelolaan pembayaran atas tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), SKIPM Padang juga dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan penerapan E-Payment PNBP yang telah berlangsung sejak tahun 2017. Tujuan penerapan E-payment PNBP merubah proses pembayaran dari tunai menjadi cashless dengan penyediaan fasilitas EDC sehingga resiko memegang uang tunai (seperti kehilangan atau salah hitung) dapat diminimalkan sehingga perhitungan menjadi lebih akurat dan akuntabel serta pelaporan yang lebih tepat waktu. Pada September 2021 juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan sehingga sertifikasi Kesehatan Ikan untuk domestik masuk dan domestik keluar tidak dikenakan biaya apapun.

3.14 Bulan Mutu Karantina Tahun 2023

Bulan Mutu Karantina Tahun 2023 di Stasiun KIPM Padang dilaksanakan dengan mengusung tema “Peran BKIPM dalam Penjaminan Ikan Sehat, Bermutu dan Bebas Mikroplastik”. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 April 2023.

Stasiun KIPM Padang melakukan penyerahan dan pendistribusian paket bantuan ikan sehat dan bermutu untuk mendukung pemenuhan protein masyarakat di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Paket bantuan berasal dari produk berkualitas tinggi yang diproduksi oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah disertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) oleh SKIPM Padang. Paket bantuan berupa fillet tuna sebanyak 700 paket dikemas dalam keadaan beku untuk menghindari kerusakan akibat kemungkinan kenaikan suhu selama pengangkutan dan pendistribusian.

Gambar 6. Rangkaian Kegiatan BMK BKIPM Tahun 2023



Sebanyak 700 paket bantuan produk ikan didistribusikan ke 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

- Kota Padang : 200 paket
- Kota Solok : 50 paket
- Kabupaten Solok : 75 paket
- Kabupaten Solok Selatan : 75 paket
- Kota Sawahlunto : 50 paket
- Kabupaten Sijunjung : 75 paket
- Kabupaten Dharmasraya : 50 paket
- Kabupaten Tanah Datar : 75 paket
- Kota Padang Panjang : 50 paket

**BAB IV ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN****4.1 Kegiatan Tata Usaha**

Kegiatan ketatausahaan di Stasiun KIPM Padang mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan teknis, sehingga dapat tercapai Tugas Pokok dan Fungsi Stasiun KIPM Padang, sesuai dengan harapan dan tujuan. Agar dapat memberikan pelayanan administrasi yang baik, maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

4.1.1 Kegiatan Administrasi Tata Kelola Persuratan

Secara Umum kegiatan ketatausahaan ini meliputi kegiatan pencatatan surat masuk dan keluar, penerimaan dan pengiriman surat, pendistribusian surat, pengetikan, pengarsipan, pelayanan sertifikasi dan pelaporan. Selama tahun 2023 tercatat sebanyak surat masuk sebanyak 508 berkas dan surat keluar sebanyak 1.117 berkas. Surat Keluar terdiri dari Surat Tugas, Surat Perintah Tugas, Undangan, dan Memorandum. Adapun sifat surat ada yang bersifat Biasa,. Untuk Surat Masuk sebanyak 508 berkas, yang terdiri dari Jenis Surat antara lain: Undangan, Surat Dinas dan Memorandum dan sifat surat Biasa, Segera dan Sangat Segera. Adapun Surat Masuk Berasal dari Internal KKP dan Eksternal.

4.2 Kegiatan Kepegawaian

Stasiun KIPM Padang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Stasiun, Urusan Umum, Ketua Tim Kerja dan Koordinator Jabatan Fungsional.

4.2.1 Keadaan Pegawai

Stasiun KIPM Padang sampai akhir tahun 2023 memiliki pegawai sebanyak 34 orang Pegawai, yang semula sebanyak 32 PNS namun pada pertengahan dan Penghujung Tahun mendapat tambahan Pegawai dengan Alasan kepindahan karena keluarga dan ikut suami, dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Mutasi Pegawai Stasiun KIPM Padang Tahun 2023

No.	Nama / NIP / Jabatan	Asal Instansi	Nomor SK Mutasi / TMT Pindah
1	Fajar Watik, A.Md 198612232010122003 PHPI Pelaksana Lanjutan	Balai KIPM Jakarta II	164/MEN- SJ.3/KP.431//VI/2023 1 Juli 2023
2.	Meiliza Zahara 199405132019022007 PHPI Pemula	Stasiun KIPM Kupang	272/MEN- SJ.3/KP.431/XI/2023 1 Desember 2023

Pegawai mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diberikan.

Untuk membantu Tugas dan fungsi Pegawai, Stasiun KIPM Padang mempunyai 9 Orang Tenaga PPNPN.

Tabel 5. Daftar Jumlah Pegawai Stasiun KIPM Padang Tahun 2023

No.	Status Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	34 Orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	- Orang
3.	Pegawai Kontrak/Pramubakti	9 Orang
Jumlah		43 orang

Tabel 6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Lingkup SKIPM Padang Sampai Akhir Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala SKIPM Padang	1
2.	Urusan Umum	1
3.	PHPI Muda	5
4.	PHPI Pertama	3
5.	PHPI Mahir	5
6.	PHPI Terampil	6
7.	PHPI Pemula	2
8.	Pengawas Mutu Pertama	2
9.	Pengawas Mutu Terampil	1
10.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
11.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
12.	Pranata Komputer Pertama	1
13.	Pranata Komputer Terampil	1
14.	Fungsional Umum	4
Jumlah		34

Pada tahun 2023 terdapat beberapa pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang (Tabel 7) dan beberapa memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (Tabel 8):

Tabel 7. Data Pegawai Stasiun KIPM Padang yang Memperoleh Kenaikan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023

No	Nama Pegawai	Pangkat/ Gol.Ruang	TMT
1.	Genofefa	Penata Tk.I, III/d	01-04-2023
2.	Sarben	Penata Tk.I, III/d	01-09-2023
3.	Teguh Usahawan	Penata Tk.I, III/d	01-10-2023
4.	Dedi Mulyana	Penata Muda Tk.I, III/.b	01-09-2023
5.	Ghina Octovia Tamtomo	Pengatur Tk.I/ II.d	01-09-2023
6.	Harinto	Penata Muda Tk.I, III/.b	01-10-2023
7.	Nova Ferida Naldo Nst	Penata Muda Tk.I, III/.b	01-10-2023
8.	Rahmi Fitri	Penata Muda Tk.I, III/.b	01-10-2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai maka setiap 2 tahun sekali Para Pegawai mendapat Kenaikan Gaji Berkala. Berikut Tabel Pegawai yang mendapat Kenaikan Gaji Berkala sebagai berikut:

Tabel 8. Data Pegawai Stasiun KIPM Padang yang Memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Tahun 2023

No	Nama	TMT KGB
1	Aji Cipto Suroso	01 Januari 2023
2	Clifferno	01 Januari 2023
3	Nova Ferida Naldo Nasution	01 Januari 2023
4	Teguh Usahawan	01 Januari 2023
5	Riza Muliani	01 Januari 2023
6	Ira Susanti	01 Februari 2023
7	Rini Sardi	01 Februari 2023
8	Ackri Yurico	01 Maret 2023
9	Ghina Octovia Tamtomo	01 Maret 2023
10	Genofefa	01 April 2023
11	Salfira	01 Mei 2023
12	Mardika Imaputra	01 Agustus 2023
13	Ivonila Etris	01 Desember 2023
14	Sri Afrina	01 Desember 2023
15	Risvana Juita	01 Desember 2023
16	Vandy Junesa	01 Desember 2023

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, kemudian diangkat pegawai kontrak/pramubakti pada tahun anggaran 2023 yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 9.

Pada tahun 2023 ini ada berkurangnya tenaga PPNP karena :

- Dua orang pegawai PPNP yang lulus dalam pengangkatan Pegawai PPPK dan di tempatkan di Eselon 1 Direktorat Perikanan Tangkap yang ditempatkan pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus;
- Dua orang pegawai PPNP mengundurkan diri karena alasan pribadi;

Tabel 9. Data Pegawai Kontrak Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2023

No	Nama	Jabatan
1	Nasrul	Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor Induk
2	Mardaleni	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kantor Induk
3	Doni Masradi	Petugas Keamanan Kantor Induk
4	Indra Jufrianto	Petugas Keamanan Kantor Induk
5	Rahmad Prayudha	Petugas Kebersihan Kantor Induk
6	Nasrul (Dedet)	Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor Induk
7	Andref Ridian Putra	Petugas Kebersihan Kantor Induk
8	Joniper Usman	Petugas Keamanan dan Kebersihan Wilker Mentawai
9.	Lulux Israthina	Petugas Kebersihan Kantor Induk

4.2.2 Cuti Pegawai

Salah satu hak pegawai adalah mendapat Cuti tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting, Data Pegawai yang melaksanakan cuti pegawai pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Data Pegawai Stasiun KIPM Padang yang mengambil Cuti Pada Tahun 2023

No	Nama Pegawai	Jenis Cuti		
		Cuti Tahunan	Cuti Sakit	Cuti Alasan Penting
1	Nuraini Umrainita	11		1
2	Genofefa	13	2	12
3	Ivonila Etris	4		
4	Santi Widya	8	1	
5	Sri Afrina	5		
6	Ackri Yurico	9	2	
7	Aji Cipto Suroso	10		
8	Ali Ramdan	7		43
9	Clifferno	6	6	
10	Dedi Hariyanto	12		

No	Nama Pegawai	Jenis Cuti		
		Cuti Tahunan	Cuti Sakit	Cuti Alasan Penting
11	Dedi Mulyana	11		
12	Ghina Octovia Tamtomo	5	2	
13	Harinto	6	2	15
14	Henhen Suhendar	9		
15	Ira Susanti	11	7	10
16	Irma Angela	11	1	
18	Nofita Febriani	9		1
19	Nova F N Nasution	9	5	
20	Octa Venianta Ginting	10	1	
21	Rahmi Fitri	10		
22	Fajar Watik	3	3	
23	Risvana Juita	12		
24	Riza Muliani	6		
25	Romi Alfian	13		
26	Salfira	12	1	
27	Sarben	4		
28	Teguh Usahawan	12	1	
29	Vandy Junesa	5		16
30	Yuli Safitri	13	2	
31	Eldas	2		

4.2.3 Pegawai Penerima Penghargaan (Reward & Punishment)

Pada Semester I tahun 2023 terdapat 1 (satu) orang pegawai menerima penghargaan sebagai pegawai terbaik dan petugas pelayanan terbaik yakni Clifferno. Pada Semester II tahun 2023 terdapat 2 (dua) orang pegawai menerima penghargaan sebagai pegawai terbaik dan petugas pelayanan terbaik yakni Sri Afrina, A. Md, S. E dan Ghina Octovia Tamtomo, A. Md.

4.3 Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

Sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pengelolaan keuangan berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dokumen pelaksanaan anggaran dituangkan dalam bentuk DIPA Stasiun KIPM Padang Tahun 2023;

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-032.13.2.567432/2022 tanggal 30 November 2022 Stasiun KIPM Padang mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 7.366.965.000,- (*tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *automatic adjustment* (blokir anggaran).

Tabel 11. Revisi DIPA SKIPM Padang Tahun 2023

No	Revisi	Tanggal	Anggaran
1	Revisi pertama	15 Februari 2023	7.366.965.000,-
2	Revisi kedua	14 April 2023	7.366.965.000,-
3	Revisi ketiga	02 Juli 2023	7.366.965.000,-
4	Revisi keempat	10 Juli 2023	7.366.965.000,-
5	Revisi kelima	19 Oktober 2023	7.506.965.000,-
6	Revisi keenam	20 November 2023	7.506.965.000,-

Pada Revisi ke-5 terdapat dan Perubahan Halaman III DIPA sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan serta penambahan belanja pegawai sebesar Rp. 140.000.000, - (*Seratus Empat Puluh Juta*), Yang berarti Terjadi Perubahan DIPA Tahun 2023 Menjadi 7.506.965.000 (*Tujuh milyar lima ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Anggaran Setelah Revisi Tahun 2023

Jenis Belanja	JUMLAH ANGGARAN	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	12,000,000	12,000,000
Pendapatan lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	12,000,000	12,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	4,139,159,000	4,279,159,000
Belanja Barang	3,043,156,000	3,043,156,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	184,650,000	184,650,000
Jumlah Belanja	7,366,965,000	7,506,965,000

Realisasi Belanja SKIPM Padang selama tahun 2023 setelah dikurangi pengembalian adalah sebesar Rp. 7.481.764.678,00 atau **99.66 persen** dari anggaran belanja sebesar Rp. 7.366.965.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4,279,159,000	4,259,519,063	99.54
Belanja Barang	3,043,156,000	3,038,759,727	99.86
Belanja Modal	184,650,000	183,322,000	99.28
Jumlah	7,506,965,000	7,481,600,790	99.66

4.3.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Stasiun KIPM Padang Mempunyai target Pendapatan Tahun 2023 Sebesar 12.000.000 (*Dua belas Juta*). Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) berasal dari: sektor karantina, pengawasan pemeriksaan, dan dari pendapatan lainnya;

Adapun penerimaan PNBP Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 29.610.057,00 atau mencapai 247 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan Stasiun KIPM Padang merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi dan Penerimaan PNBP Tahun 2023

Jenis Pendapatan	2023		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	480,000	500,000	104.17
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	11,520,000	24,720,000	214.58
Pendapatan Denda	-	-	-
Penerimaan Kembali TAYL	-	1,189,857	100
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	3,200,200	100
Jumlah	12,000,000	29,610,057	246.75

4.4 Pengelolaan Barang Milik Negara Stasiun KIPM Padang

Pada Tahun 2023 mempunyai Aset Inventaris sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 16.382.642.355 (*Enam belas milyar tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*);

Adapun Aset tetap yang dipunyai antaranya Tanah, Gedung dan Bangunan Kantor, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

Ditahun 2023 ini Stasiun KIPM Padang mengadakan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 1 (satu) Kali yang telah disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 648/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebanyak 36 (tiga puluh) unit Peralatan dan Mesin yang punya nilai perolehan sebesar Rp. 170.597.000.- (*Seratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*).

Penghapusan BMN selanjutnya dilakukan pelelangan secara terbuka dan dari hasil lelang tersebut mempunyai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.200.200., (*Tiga juta dua ratus ribu dua ratus rupiah*), yang disetorkan ke Rekening Negara. Adapun keadaan Data Inventaris Kantor BMN Stasiun KIPM Padang Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 7.

BAB V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan data yang disajikan pada Laporan Kegiatan Operasional, Administrasi dan Keuangan selama Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pelayanan di Stasiun KIPM Padang telah dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang ada dibuktikan dengan capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **97,59** dengan Mutu Layanan **(A)** dan Kinerja Layanan "**Sangat Baik**".
- Hingga Tahun 2023, Stasiun KIPM Padang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan telah terakreditasi untuk Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015; Lembaga Layanan Publik, Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025:2015 ; Laboratorium Uji, dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020:2012 ; Lembaga Inspeksi.
- Kegiatan Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor di Stasiun KIPM Padang pada tahun 2023 sebanyak **62 kali** dengan volume komoditi hidup sebanyak **195.651 Ekor** dan komoditi non-hidup sebesar **124.804,98 kg** dengan nilai komoditi sebesar **Rp 19.766.059.092,-**.
- Kegiatan Sertifikasi Kesehatan Ikan Domestik keluar di Stasiun KIPM Padang pada tahun 2023 sebanyak **3.169 kali** dengan volume komoditi hidup sebanyak **1.973.869 Ekor** dan komoditi non-hidup sebesar **584,410 kg** dengan nilai komoditi sebesar **Rp 82.904.545.467,-**.
- Kegiatan lalulintas domestik masuk yang frekuensinya sebanyak **904 kali** dengan volume komoditi hidup sebanyak **143.804.215 Ekor** dan komoditi non-hidup sebesar **57.853 kg** dengan nilai komoditi sebesar **Rp 36.485.998.600,-**.

- Selama tahun 2023, terjadi dua kasus pelanggaran di Stasiun KIPM Padang. Kasus tersebut yaitu ditemukan lobster bertelur dalam kondisi hidup sebanyak 5 (lima) ekor dan lobster di bawah ukuran sebanyak 1 (satu) ekor yang akan dilalulintaskan ke Jakarta. Tindak lanjut penyelesaian dua kasus pelanggaran tersebut yaitu dilakukan pembinaan.
- Selama tahun 2023, kegiatan pengujian hama dan penyakit ikan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan baik domestik keluar maupun domestik masuk secara umum telah berjalan dengan baik. Metode Pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksa parasit menggunakan metode mikroskopis konvensional dan pengujian bakteri menggunakan metode konvensional serta pemeriksaan Virus secara PCR (Polymerase Chain Reaction) secara Konvensional.
- Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dalam dua periode. Periode pertama dilaksanakan pada bulan Februari, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus. Hasil pemeriksaan sampel ditemukan PIK golongan bakteri yaitu *Aeromonas salmonicida* pada ikan mas di Kabupaten Agam tapi pada pemantauan periode II pada sampel ikan dan lokasi yang sama hasilnya negatif. Pada pemantauan PIK tahun 2023 ini tidak ditemukan penyakit ikan air Laut baik dari golongan bakteri maupun dari golongan virus yang menjadi target PIK tahun 2023.

- Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang melalui kegiatan pemetaan sebaran jenis agen hayati yang bersifat invasif (JABI) di wilayah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan pemetaan sebaran jenis ikan invasif sebanyak 2 (dua) kali. Adapun pelaksanaan kegiatan ini di Kota Padang dilakukan pada bulan Februari dan Juli, sedangkan di Kota Bukittinggi dilakukan pada bulan Maret dan Juli. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat pada kelompok penjual ikan hias, jumlah spesies paling banyak yang ditemukan yang bersifat invasif/berpotensi invasif yaitu Ikan Sapu-sapu.
- Pada tahun 2023 Stasiun KIPM Padang melaksanakan kegiatan inspeksi dan verifikasi terhadap Unit Pengolah Ikan (UPI) dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Total UPI yang telah disertifikasi HACCP pada tahun 2023 sebanyak 4 UPI.
- Selain Sertifikasi HACCP tersebut diatas, juga dilakukan sertifikasi penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) terhadap Unit Pengumpul/Supplier. Adapun jumlah Supplier yang disertifikasi CPIB selama tahun anggaran 2023 sebanyak 9 Supplier yang merupakan supplier dengan status perpanjangan dan 5 Supplier yang merupakan supplier dengan status penerbitan baru.

- Dalam rangka menjalankan amanat Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta menjalankan fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Stasiun KIPM Padang pada tahun 2023 melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap produk perikanan sebanyak 2 kali di beberapa lokasi pasar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat antara lain : Pasar Lubuk Sikaping, Pasar Kumpulan dan Pasar Panti. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa pasar tradisional di Kabupaten Pasaman Barat memiliki nilai kelayakan dengan kategori **KURANG** pada Semester I dan Semester II.
- Selama tahun 2023 tercatat sebanyak 508 (lima ratus delapan) buah Surat Masuk dan 1.117 (seribu seratus tujuh belas) buah Surat Keluar. Jenis-jenis surat tersebut adalah bidang Kepegawaian (KP), Tata Usaha (TU), Perlengkapan (PL), Hukum (HK), Humas (HM), Karantina Ikan (KI), Perencanaan (RC), Organisasi Tata Laksana (OT), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur/Perikanan (DL), Karantina Ikan (KI) dan lain-lain
- Untuk data keadaan pegawai sampai dengan akhir tahun 2023 Stasiun KIPM Padang memiliki pegawai sebanyak 43 orang pegawai yang terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Tenaga Kontrak.
- Stasiun KIPM Padang pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.366.965.000,- (*tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*). Pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) kali revisi DIPA. Sampai dengan akhir tahun, pengelolaan Anggaran Tahun 2023 Stasiun KIPM Padang, untuk realisasi keuangan mencapai 99,66%.

5.2 Saran

- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) lebih banyak mengadakan pembinaan serta pelatihan teknis, administrasi dan keuangan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pegawai dimasing-masing Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM khususnya bagi Stasiun KIPM Padang.
- Perlu peningkatan kualitas pelayanan di Stasiun KIPM Padang dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001 : 2015 dan SNI ISO/IEC 17025 : 2017 serta SNI ISO/IEC 17020:2012 agar dapat berjalan sesuai Manual Mutu dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Dalam rangka mendukung tuntutan zaman dan metode pengujian laboratorium terbaru serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, diharapkan di masa mendatang dapat dilakukan penambahan parameter ruang lingkup pengujian laboratorium dan lembaga inspeksi agar dapat meningkatkan kapasitas laboratorium sehingga dapat bersaing dengan laboratorium dan lembaga inspeksi lainnya.
- Dalam rangka mendukung kinerja organisasi diharapkan kedepan dapat dilakukan langkah-langkah kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pengawasan dan pengendalian tindak karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan agar dapat secara bersama-sama menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Barat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Lalu Lintas Ekspor SKIPM Padang 2023

NO	JENIS KOMODITI	TAHUN 2023					NILAI (Rp)	FREK
		EKOR	KG	BATANG	LITER			
1	Siput Kapah	7,060	0	0	0	5,295,000	1	
2	Ikan Hias Laut	14,100	0	0	0	835,000,000	6	
3	Lokan	14,400	0	0	0	10,800,000	2	
4	Benih Ikan Garing	126,500	0	0	0	66,500,000	5	
5	Cupang	397	0	0	0	39,700,000	1	
6	Ikan kering	0	319	0	0	27,641,614	8	
7	Teripang Kering	0	0	0	0	0	0	
8	A.Corrugata	940	0	0	0	705,000	1	
9	Kerapu Hidup	32,168	0	0	0	2,182,480,000	5	
10	Patin Beku	0	23	0	0	1,725,000	1	
11	Frozen Tuna	0	123366.77	0	0	16,489,121,298	9	
12	Ikan Kembung	0	2	0	0	324,500	3	
13	Ikan Garing segar/Beku	0	1,088	0	0	89,296,680	16	
14	Lainnya	86	6	0	0	17,470,000	4	
	Jumlah	195,651	124804.975	0	0	19,766,059,092	62	

Lampiran 2. Data Lalu Lintas Domestik Keluar SKIPM Padang 2023

NO	JENIS KOMODITI	TAHUN 2023					
		EKOR	Kg	Liter	Batang	NILAI (Rp)	FREK
1	Lobster	170,476	0	0	0	12,785,700,000	910
2	Ikan Hias Laut	505,259	0	0	0	37,784,425,000	686
3	Ikan Cupang	13,527	0	0	0	1,352,700,000	244
4	Lobster Air Tawar	118,350	0	0	0	828,450,000	274
5	Benih Gurame	0	0	0	0	0	0
6	Teripang Kering	0	0	0	0	0	0
7	Gurita	0	0	0	0	0	0
8	Ikan Tuna segar	0	89,823	0	0	7,049,275,210	44
9	Keong Bawang	155,300	0	0	0	155,300,000	8
10	Ikan Tenggiri	0	147	0	0	11,025,000	1
11	Ikan Kerapu	767	0	0	0	98,100,000	3
12	Ikan Tongkol Beku	0	181,081	0	0	3,975,986,400	27
13	Bilih kering	36,200	0	0	0	253,400,000	5
14	Ikan selar	0	0	0	0	0	0
15	Bawal	0	1,943	0	0	184,585,000	15
16	Kepiting	11,146	0	0	0	835,950,000	98
17	Ikan hias air tawar	118,697	0	0	0	1,379,235,000	212
18	Ikan Kakap segar	0	0	0	0	0	0
19	Ikan Betutu	17,659	0	0	0	529,770,000	167
20	Kerapu segar	0	175	0	0	52,500,000	1
21	Ikan garing beku	0	3,215	0	0	257,200,000	68
22	Ikan garing hidup	58,191	365	0	0	3,520,660,000	21
23	Lobster Segar	0	7,717	0	0	578,775,000	141
24	Betutu Beku	0	1,133	0	0	22,660,000	5
25	Udang Vaname Segar	0	8,160	0	0	816,000,000	4
26	Daging Kodok	0	490	0	0	416,500,000	4
27	Kakak Tua Segar	0	88,353	0	0	1,823,080,350	16
28	Cakalang Segar	0	14,514	0	0	242,951,400	4
29	Benih Garing	47,000	0	0	0	329,000,000	5
30	Tetelan Tuna	0	23,400	0	0	408,000,000	2
31	Minyak Ikan Hiu	0	7,920	0	0	950,400,000	3
32	Ikan Lumadang Segar	0	1,210	0	0	23,271,850	0
33	Sirip Hiu	0	77	0	0	57,660,000	2
35	Umang beku	0	59,030	0	0	1,475,750,000	9
35	Ikan layur segar	0	1,500	0	0	75,000,000	6
36	Lainnya	721,297	94,157	0	0	4,631,235,257	184
JUMLAH		1,973,869	584,410	0	0	82,904,545,467	3,169

Lampiran 3. Data Lalu Lintas Domestik Masuk SKIPM Padang 2023

NO	JENIS KOMODITI	TAHUN 2023					
		EKOR	KG	Liter	Batang	NILAI (Rp)	FREK
1	Ikan Hias Tawar	668,734	0	0	0	8,054,320,000	476
2	Benur Vannamei	142,649,180	0	0	0	8,558,950,800	111
3	Benih Kerapu	71,000	0	0	0	63,900,000	5
4	Benih Ikan Nila	154,000	0	0	0	143,200,000	4
5	Ikan Cupang	87,046	0	0	0	8,704,600,000	48
6	Kura-Kura Brazil	635	0	0	0	3,175,000	2
7	Ikan lele	201	0	0	0	12,060,000	4
8	Benih bawal	0	0	0	0	0	0
9	Ikan Sidat	0	0	0	0	0	0
10	Pakan Alami	0	28	0	0	3,640,000	4
11	Frozen Tuna	0	25	0	0	4,375,000	1
12	Kerapu merah segar	0	2,800	0	0	209,090,000	9
13	Ikan Hias Laut	52,790	0	0	0	3,940,500,000	24
14	Telur gurame	0	10	0	0	2,500,000	1
15	Kepiting Bakau	7,150	0	0	0	536,250,000	30
16	Lobster	6,310	0	0	0	2,006,000,000	46
17	Gurita segar	0	33,130	0	0	1,832,150,000	21
18	Kakap Merah segar	0	5,250	0	0	882,000,000	18
19	Tongkol Segar	0	11,200	0	0	398,691,200	16
20	Ikan Kakak Tua	0	2,700	0	0	63,720,000	8
21	Ikan nila	40,000	0	0	0	800,000,000	1
22	Cumi-cumi	0	500	0	0	35,000,000	2
23	Lainnya	67,169	2,210	0	250	231,876,600	73
	JUMLAH	143,804,215	57,853	0	250	36,485,998,600	904

Lampiran 4. Data Jenis Ikan Hias Invasif yang diperjualbelikan di Kota Padang dan Bukittinggi Hasil Pemetaan Jenis Agen Hayati yang Bersifat Invasif (JABI) Stasiun KIPM Padang Tahun 2023

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Nama Lokal
1	<i>Atractosteus spatula</i> 	Spatula gar	Ikan Buaya
2	<i>Cichla monoculus</i> 	Peacock Bass	P-Bass
3	<i>Pterygoplichthys pardalis</i> 	Sapu - sapu	Sapu - sapu
4	<i>Metynnis argentus</i> 	Silver Dollar	Silver Dollar
5	<i>Serrasalmus spilopleura</i> 	Piranha	Piranha

6	<p><i>Ctenolucius hujeta</i></p> 	Ikan Hujeta Gar	Ikan buaya Hujeta
7	<p><i>Trachelyopterus fisheri</i></p> 	Ikan Columbia cat Fish	Ikan Columbia cat Fish
8	<p><i>Chana maruloides</i></p> 	Chana Yellow Sentarum	Ikan Gabus

Lampiran 5. Hasil pemeriksaan Laboratorium pada Pemantauan PIK 2023

Lokasi	Target Ikan	Hasil Pemeriksaan Lab Periode I (PIK Target)	Hasil Pemeriksaan Lab Periode II (PIK Target)	
Kab. Pasaman	Mas	Negatif (-) KHV	Negatif (-) KHV	
		Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC	
		Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	
	Gurami	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	
		Negatif (-) RSIVD	Negatif (-) RSIVD	
	Ikan Nila	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	
		Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC	
		Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	
		Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	
		Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	
	Kab. Lima puluh kota	Mas	Negatif (-) KHV	Negatif (-) KHV
			Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC
Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>			Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	
Nila		Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	
		Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC	
		Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	
		Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	
		Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	
Gurami		Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	
		Negatif (-) RSIVD	Negatif (-) RSIVD	
Lele		Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonisida</i>	
		Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	
			Negatif (-) Koi Herpes Virus (KHV)	Negatif (-) Koi Herpes Virus (KHV)

Kab. Pasaman Barat	Mas	Negatif (-) Spring Viraemia of Carp (SVC)	Negatif (-) Spring Viraemia of Carp (SVC)	
		Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
	Nila	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	
		Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	
		Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC	
		Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
	Gurami	Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	
		Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Negatif (-) RSIVD	Negatif (-) RSIVD	
Kab. Agam	Nila	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	
		Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	
		Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC	
		Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	
	Udang Vanna mei	Negatif (-) AHPND	Negatif (-) AHPND	
		Negatif (-) WSSV	Negatif (-) WSSV	
		Negatif (-) TSV	Negatif (-) TSV	
		Negatif (-) IHHNV	Negatif (-) IHHNV	
		Negatif (-) Yellow Head Virus (YHD)	Negatif (-) Yellow Head Virus (YHD)	
		Negatif (-) Covert Mortality Nodavirus (CMNV/VCMD)	Negatif (-) Covert Mortality Nodavirus (CMNV/VCMD)	
		Negatif Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP-HPM)	Negatif Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP-HPM)	
		Negatif (-) IMNV	Negatif (-) IMNV	
	Mas	Negatif (-) Koi Herpes Virus (KHV)	Negatif (-) Koi Herpes Virus (KHV)	
		Negatif (-) Spring Viraemia of Carp (SVC)	Negatif (-) Spring Viraemia of Carp (SVC)	
		Positif (+) Aeromonas salmonicida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Nila	Negatif (-) Tilapia lake Virus	Negatif (-) Tilapia lake Virus

Kota Pariaman		(TiLV)	(TiLV)	
		Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	
		Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC	
		Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	
	Lele	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	
	Gurami	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Negatif (-) RSIVD	Negatif (-) RSIVD	
Kota Padang	Nila	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)	
		Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)	
		Negatif (-) SVC	Negatif (-) SVC	
		Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	Negatif (-) Edwardsiella ictaluri	
	Gurami	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	
		Negatif (-) Infection with megalocytivirus (RSIVD)	Negatif (-) Infection with megalocytivirus (RSIVD)	
	Udang Vanna mei	Negatif (-) AHPND	Negatif (-) AHPND	
		Negatif (-) WSSV	Negatif (-) WSSV	
		Negatif (-) TSV	Negatif (-) TSV	
		Negatif (-) IHNV	Negatif (-) IHNV	
		Negatif (-) Yellow Head Virus (YHD)	Negatif (-) Yellow Head Virus (YHD)	
		Negatif (-) Covert Mortality Nodavirus (CMNV/VCMD)	Negatif (-) Covert Mortality Nodavirus (CMNV/VCMD)	
		Negatif (-) Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP-HPM)	Negatif (-) Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP-HPM)	
	Negatif (-) IMNV	Negatif (-) IMNV		
	Kab. Pesisir Selatan	Kerapu	Negatif (-) VNN	Negatif (-) VNN
			Negatif (-) RSIVD	Negatif (-) RSIVD
Lele		Negatif (-) Aeromonas salmonisida	Negatif (-) Aeromonas salmonisida	

		<i>Negatif (-) Edwardsiella ictaluri</i>	<i>Negatif (-) Edwardsiella ictaluri</i>
Udang Vanna mei		<i>Negatif (-) AHPND</i>	<i>Negatif (-) AHPND</i>
		<i>Negatif (-) WSSV</i>	<i>Negatif (-) KHV</i>
		<i>Negatif (-) TSV</i>	<i>Negatif (-) SVC</i>
		<i>Negatif (-) IHNV</i>	<i>Negatif (-) Aeromonas salmonisida</i>
		<i>Negatif (-) Yellow Head Virus (YHD)</i>	<i>Negatif (-) Aeromonas salmonisida</i>
		<i>Negatif (-) Covert Mortality Nodavirus (CMNV/VCMD)</i>	<i>Negatif (-) RSIVD</i>
		<i>Negatif (-) Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP-HPM)</i>	<i>Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)</i>
		<i>Negatif (-) IMNV</i>	<i>Negatif (-) SVC</i>
	Nila		<i>Negatif (-) Tilapia lake Virus (TiLV)</i>
		<i>Negatif (-) Viral Nervous Necrosis (VNN)</i>	<i>Negatif (-) Aeromonas salmonisida</i>
		<i>Negatif (-) SVC</i>	<i>Negatif (-) Edwardsiella ictaluri</i>
		<i>Negatif (-) Aeromonas salmonisida</i>	<i>Negatif (-) KHV</i>
		<i>Negatif (-) Edwardsiella ictaluri</i>	<i>Negatif (-) SVC</i>

Lampiran 6. Hasil Pengujian Laboratorium Sampel INPRES 01 Tahun 2023 Stasiun KIPM Padang

Tabel Hasil Pengujian Laboratorium SKIPM Padang Semester I

Lokasi	Jenis Sampel	Organoleptik (Standar Min. 7)		Cemaran Mikrobiologi						Formalin	
				E coli (MPN/gr) (Standar Negatif)		Salmonella per 25 gr (Standar Negatif)		ALT (Standar < 5x10 ⁵)			
Pasar Lubuk Sikaping	Ikan Kembung	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	1,07x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Ikan Kurisi	7	MS	6,1	TMS	Negatif	MS	2,44x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Selar Kuning	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	1,15x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Tongkol	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	6,9x10 ³	MS	Negatif	MS
	Ikan Layang	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	4,5x10 ³	MS	Negatif	MS
Pasar Kumpulan	Ikan Pisang-pisang	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	1,45x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Kembung	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	2,3x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Ikan Kuwe	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	5,33x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Udang	6	TMS	15	TMS	Positif	TMS	1,72x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Cumi-cumi	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	2,45x10 ⁴	MS	Negatif	MS
Pasar Panti	Ikan Cakalang	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	1,31x10 ³	MS	Negatif	MS
	Ikan Makarel	6	TMS	6,2	TMS	Positif	TMS	2,95x10 ²	MS	Negatif	MS
	Udang	7	MS	7,4	TMS	Negatif	MS	5,95x10 ²	MS	Negatif	MS
	Cumi-cumi	7	MS	3	TMS	Negatif	MS	1,85x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Layang	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	1,62x10 ⁴	MS	Negatif	MS

Tabel Hasil Pengujian Laboratorium SKIPM Padang Semester II

Lokasi	Jenis Sampel	Organoleptik (Standar Min. 7)		Cemaran Mikrobiologi						Formalin	
				E coli (MPN/gr) (Standar Negatif)		Salmonella per 25 gr (Standar Negatif)		ALT (Standar < 5x10 ⁵)			
Pasar Lubuk Sikaping	Ikan Kembung	6	TMS	3,6	TMS	Negatif	MS	1,07x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Ikan Kurisi	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	3,15x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Selar Kuning	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	1,8x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Tongkol	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	2,5x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Layang	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	2,52x10 ⁴	MS	Negatif	MS
Pasar Kumpulan	Ikan Pisang-pisang	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	4,06x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Ikan Kembung	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	4,17x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Ikan Mackarel	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	2,46x10 ⁴	MS	Negatif	MS
	Udang	7	MS	7,4	TMS	Negatif	MS	1,31x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Ikan Layang	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	3,9x10 ⁴	MS	Negatif	MS
Pasar Panti	Ikan Selar Kuning	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	1,15x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Ikan Sarden	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	1,7x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Udang	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	3,17x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Cumi-cumi	7	MS	< 3	MS	Negatif	MS	1,32x10 ⁵	MS	Negatif	MS
	Ikan Layang	6	TMS	< 3	MS	Negatif	MS	1,74x10 ⁵	MS	Negatif	MS

**Lampiran 7. Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Stasiun KIPM
Padang Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	30 Juni 2023	31 Desember 2023 UnAudited	Naik atau (Turun)	%
Aset Lancar					
1171	Persediaan	165.695.914	280.805.036	115.109.122	69,47
	Jumlah Aset Lancar	165.695.914	280.805.036	115.109.122	69,47
INTRAKOMTABEL					
Aset Tetap					
1311	Tanah	1.985.290.880	1.985.290.880	-	-
1321	Peralatan dan Mesin	7.060.103.715	7.084.153.715	24.050.000	0,34
1331	Gedung dan Bangunan	6.973.191.307	6.973.191.307	-	-
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	223.660.000	223.660.000	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	16.242.245.902	16.266.295.902	24.050.000	0,34
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah KDP	-	-	-	-
Aset Lainnya					
1621	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
1661	Aset Tetap Tidak Digunakan	-	-	-	-
1661	ATB Tidak Digunakan	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
1371	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.095.417.210)	(6.309.847.620)	(214.430.410)	(3,51)
1372	Penyusutan Gedung Bangunan	(759.486.895)	(828.448.678)	(68.961.784)	(11,01)
1373	Penyusutan JIJ	(83.330.000)	(86.266.000)	(2.936.000)	(3,52)
1691	Penyusutan Aset Henti Guna	-	-	-	-
	Jumlah Penyusutan				
TOTAL ASET DAN PERSEDIAAN		(6.938.234.105)	(7.224.562.298)	(286.328.194)	(18,04)
EKSTRAKOMTABEL					
1321	Peralatan dan Mesin	7.060.103.715	7.060.103.715	-	-
1331	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
1661	Aset Lain-Lain	-	-	-	-
TOTAL EKSTRAKOMTABEL		7.060.103.715	7.060.103.715	-	-
TOTAL GABUNGAN		16.529.811.426	16.382.642.355	(147.169.072)	51,77

